



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

Sosialisasi PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH (KNMP) 2026



Tim Satuan Tugas
Kampung Nelayan Merah Putih
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta, 27 Maret 2026



Stereotip Kampung Nelayan di Indonesia



Stereotip Kampung Nelayan di Indonesia :

- Permukiman kumuh
- Minim sarana dan prasarana
- Terbatas akses pendidikan
- Terbatas akses kesehatan
- Terbatas akses teknologi
- Rentan bencana alam



“ **Sebanyak 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan pesisir**, namun banyak di antaranya, terutama nelayan dan pembudidaya ikan, hidup dalam kondisi yang identik dengan kemiskinan.



Amanat Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

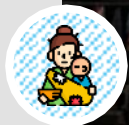


Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia

Prioritas Pembangunan*



8%
Pertumbuhan
Ekonomi



0%
Tingkat
Kemiskinan



Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Manusia

Visi*

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi*

Asta Cita ke-2

“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui **swasembada pangan**, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan **ekonomi biru**”

Asta Cita ke-6

“**Membangun dari desa** dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”

Inpres No. 14 Tahun 2025

“**Percepatan Pembangunan** Kawasan **Swasembada Pangan**, Energi, dan Air Nasional”

Kampung Nelayan Merah Putih



Tujuan



Peningkatan
Kesejahteraan



Peningkatan
Ekonomi



Peningkatan
Produktivitas

Strategi



*Social
Engineering*



*Infrastruktur
Modern &
Sustainable*



Pendekatan
Tematik

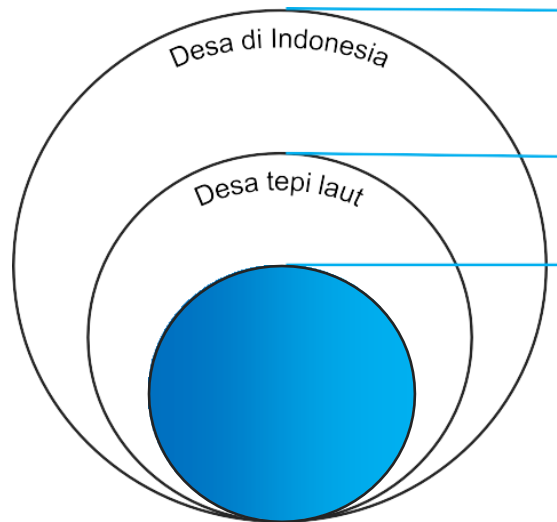
*Sumber:
Perpres No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih



Pembangunan **Kampung Nelayan Merah Putih** dirancang **terintegrasi dari hulu ke hilir** untuk **mentransformasi ruang hidup dan sosial**, sehingga dapat **meningkatkan produktivitas**, mendorong **kemandirian ekonomi**, dan **kesejahteraan masyarakat melalui social engineering**

Estimasi Jumlah Ideal Kampung Nelayan Merah Putih



75.635 desa di Indonesia

12.968 desa tepi laut

~1.300 desa berpotensi yang telah memiliki **Koperasi Desa**

Sesuai dengan teori "10% Tipping Point"

Sumber Data Desa: Statistik Potensi Desa Indonesia, Badan Pusat Statistik

Catatan: Teori "10% Tipping Point" menyatakan bahwa jika 10% dari populasi mengadopsi suatu perilaku baru, maka dapat memicu mayoritas populasi untuk turut berubah.

Kriteria Minimal



Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan



Ketersediaan dan status lahan *clear and clean* untuk pembangunan fasilitas produksi (> 0,5 Ha)



Terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih



Memiliki potensi SDI, dan wisata Bahari yang dapat dikembangkan



Keberterimaan masyarakat dan pemerintah setempat, serta siap diberdayakan (*social engineering*)

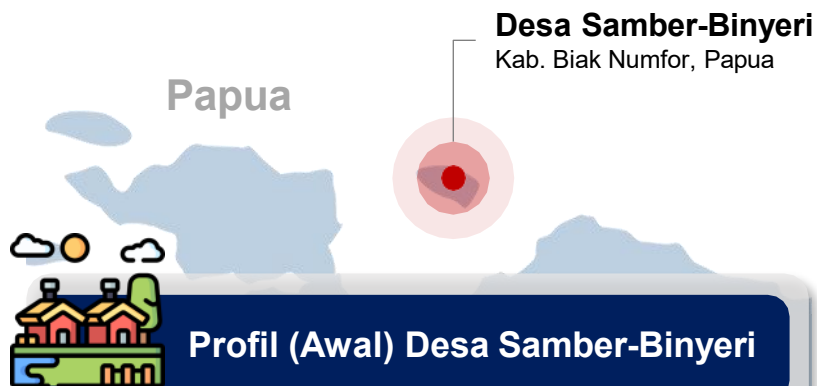
Ruang Lingkup Pekerjaan

Fasilitas Pendaratan Ikan, Bengkel Nelayan, Docking Kapal, Kios Perbekalan, Kantor Pengelola, Bale Nelayan, Revetment, Saluran Dan Jalan Lingkungan, Pabrik Es, Coolbox, Gudang Beku Portable, Mobil Berpendingin, Kapal Dan Alat Penangkapan Ikan, Kios Kuliner, Shelter Coolbox, Pos Jaga, Gerbang Kawasan, Area Parkir, Tangki Air, Bangunan Genset, Penerangan Kawasan, Bangunan IPAL, Pagar Kawasan, Tempat Ibadah, Tempat Pembuangan Sampah, Toilet Umum

* Menyesuaikan per lokasi



CONTOH: Pembangunan Modeling KALAMO Samber-Binyeri



Desa Samber-Binyeri
Kab. Biak Numfor, Papua

Profil (Awal) Desa Samber-Binyeri



Jumlah Nelayan: 160 orang



Kapal: 12 sampan, 93 perahu motor
Alat Penangkapan Ikan (API): mayoritas *handline*
Jenis tangkapan utama: TCT



Rata-rata tangkapan per hari 100-200 kg/perahu



Kontribusi produksi 70% (800-1000 kg/hari)
Tercatat rata-rata ikan yang dijual di Pasar Fandoi ± 1150-1420 kg/hari dengan 70% berasal dari Samber Binyeri (± 800-1000 kg/hari)



Pendapatan rata-rata Rp3 juta/bulan
UMK Kota Biak Rp3,8 juta/bulan



Sarana dan prasarana perikanan tidak tersedia (dermaga, pabrik es, docking, bengkel)



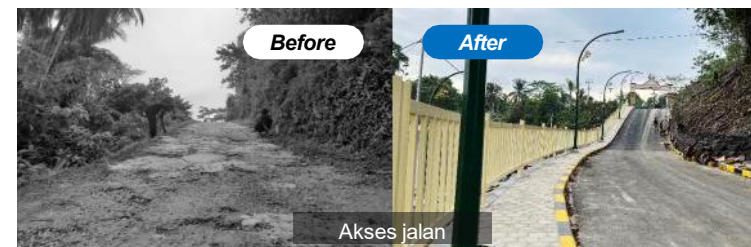
Proses Pembangunan Infrastruktur



Before

After

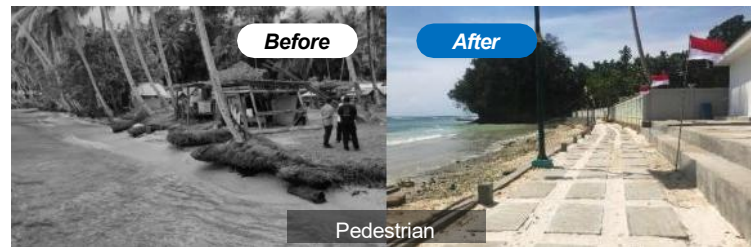
Tampak atas



Before

After

Akses jalan



Before

After

Pedestrian



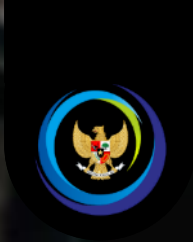
Before

After

Dermaga

Modeling Kampung Nelayan Merah Putih

Pada tahun 2023, modeling Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di Desa Samber-Binyeri, Kab. Biak Numfor, Prov. Papua



Lokasi



Desa Samber-Binyeri
Kab. Biak Numfor, Papua

Total Intervensi



± Rp22,1 Miliar



Diresmikan oleh Presiden
Joko Widodo pada tanggal
24 November 2023

Dampak



Meningkatnya produktivitas
masyarakat nelayan lokal



Meningkatnya pendapatan
dan kesejahteraan
masyarakat nelayan lokal

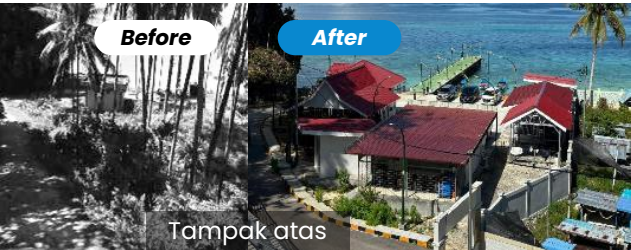
Rp3 juta
per bulan

Rp6 juta
per bulan

Pembangunan Infrastruktur



Akses jalan



Tampak atas



Pabrik es



Balai pelatihan



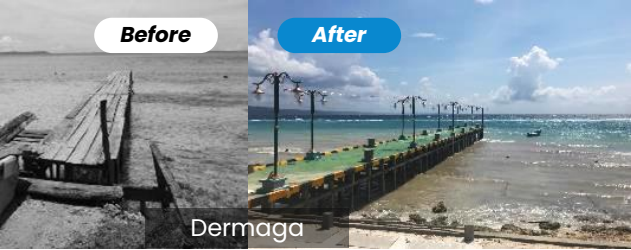
Gudang beku



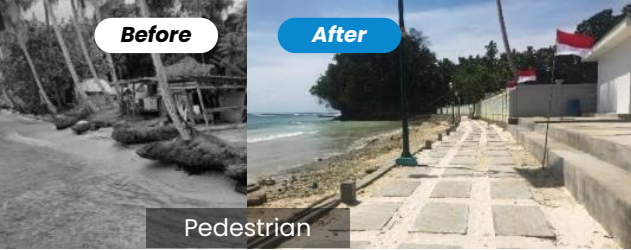
Bengkel nelayan



Kios persediaan



Dermaga



Pedestrian



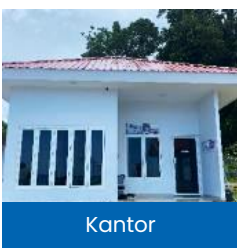
Sentra kuliner



TPI



Docking kapal



Kantor



Shelter cool

Sebaran 2.910 Desa Nelayan (Data Potensi Desa – Podes, BPS)

Papua (518 Desa) → Kandidat Lokasi KNMP (Target = 200 Lokasi)



Desa Per Provinsi



Papua
210 Desa



Papua Barat
114 Desa



Papua Barat Daya
114 Desa

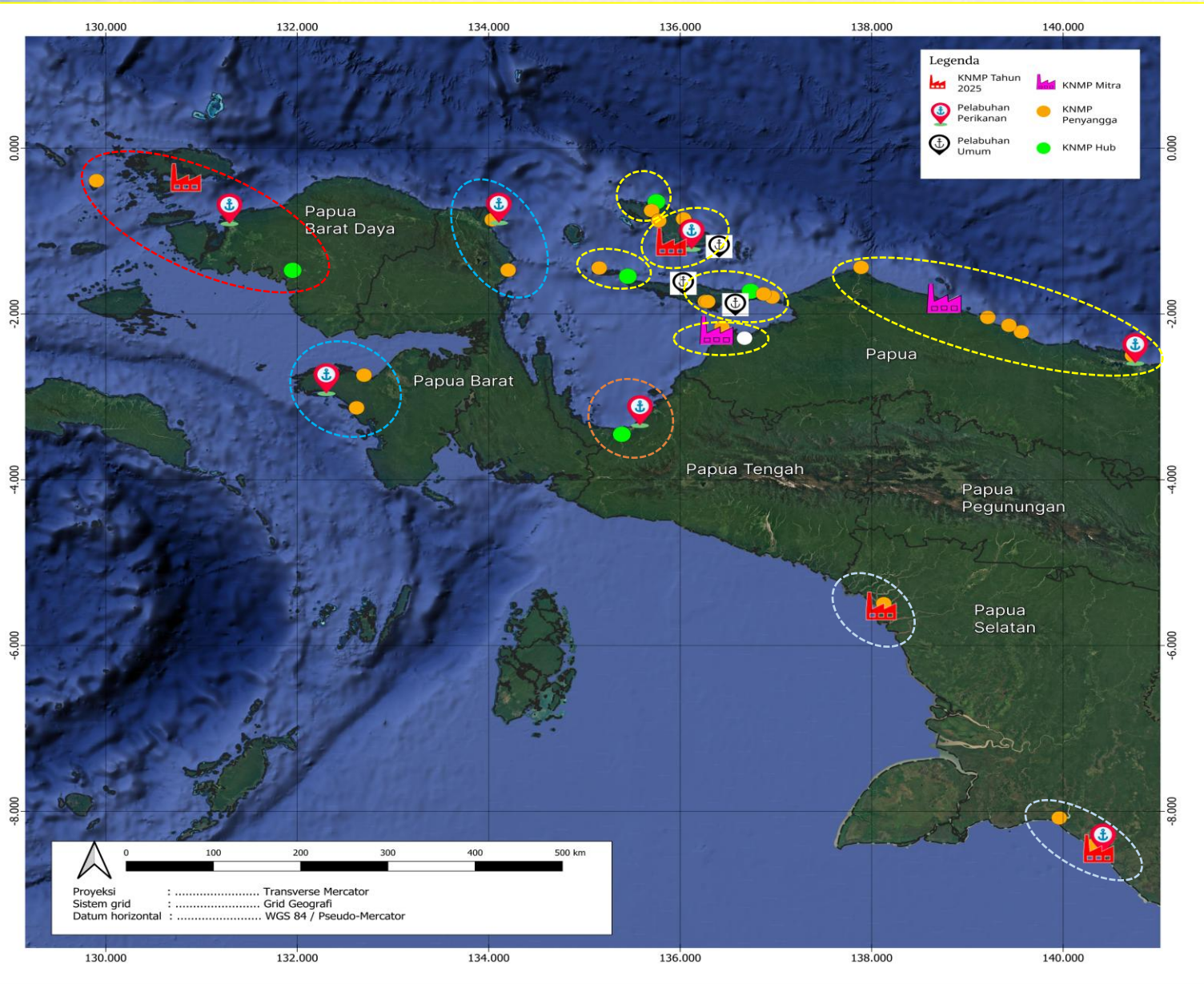


Papua Selatan
39 Desa



Papua Tengah
41 Desa

Lokasi KNMP Usulan Yang Sudah Disurvei (29 Lokasi) – Sistem Klaster



PROVINSI PAPUA

HUB:

1. Sarmi Kota (KNMP Mitra)
2. Sere Sere
3. Waren (KNMP Mitra)
4. Woinap
5. Waryesi

Penyangga:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Tahima Soroma | 8. Turu |
| 2. Tarontha | 9. Umani |
| 3. Anus Podena | 10. Odase |
| 4. Yamna | 11. Ausem |
| 5. Warembori | 12. Marsram |
| 6. Barawai | 13. Yenbepioper |
| 7. Kaipuri | 14. Mnuswar |
| | 15. Ampembukor |

PROVINSI PAPUA BARAT

HUB:

1. Goras

Penyangga:

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Tunas Gain | 3. Sowi |
| 2. Goras Selatan | 4. Abreso |

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

HUB: Warmagege

Penyangga: Gag

PROVINSI PAPUA TENGAH

HUB: Siritwini

Penyangga: -

PROVINSI PAPUA SELATAN

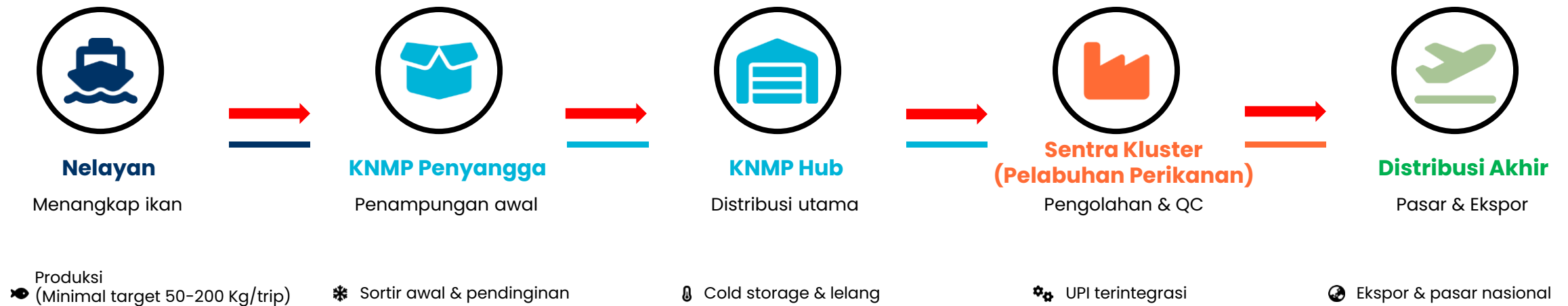
HUB:

1. Kaye (KNMP 2025)
2. Samkai (KNMP 2025)

Penyangga:

1. Bis Agats
2. Domande
3. Urumb

BAGAIMANA CARA KERJA SISTEM KLAS TER PADA KNMP 2026



Justifikasi :

Produksi dan karakteristik wilayah beragam → perlu intervensi yang berbeda

Kesulitan penyediaan lahan jika hanya bertumpu pada intervensi yang hanya membutuhkan lahan saja

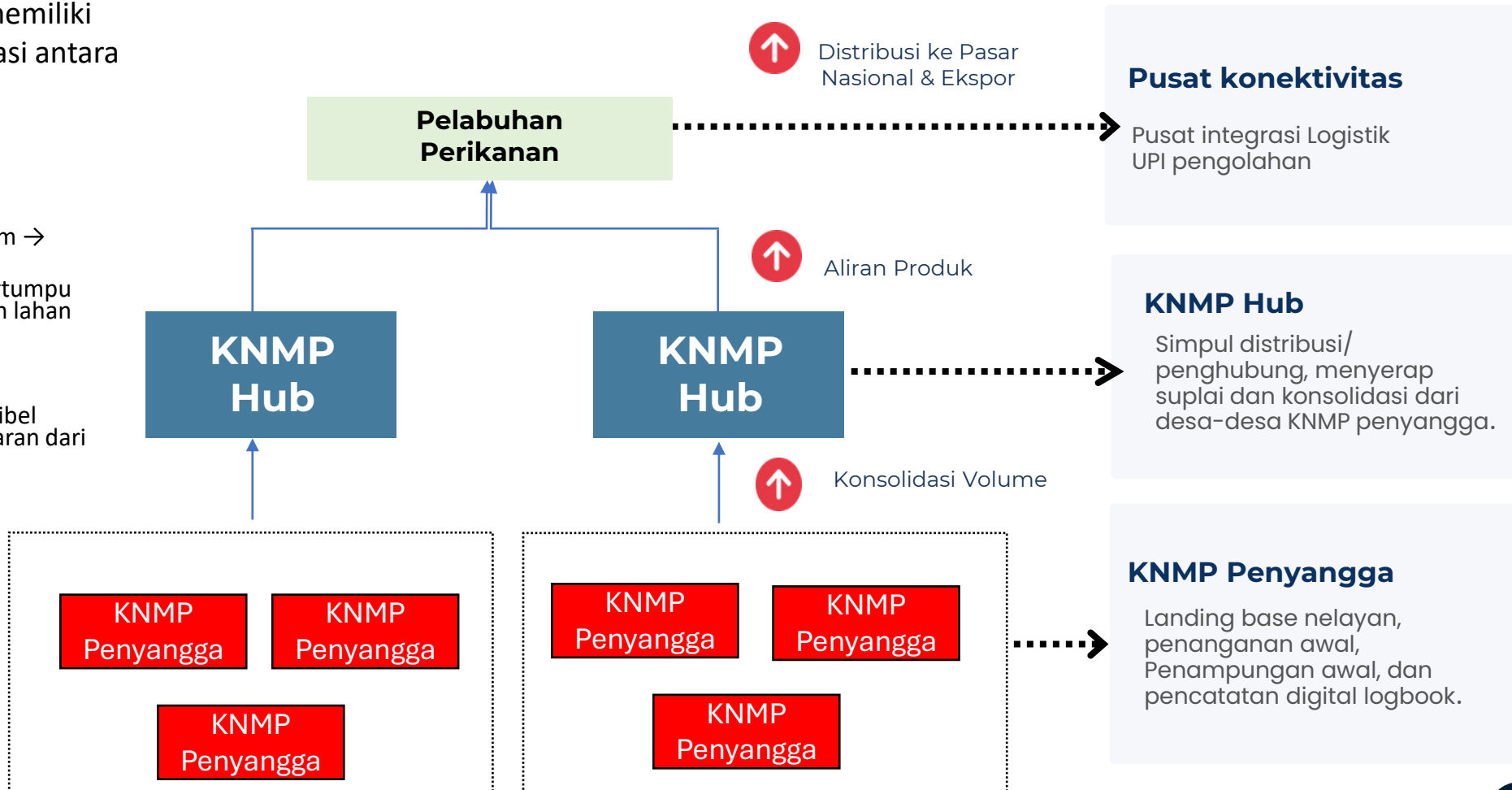
Membentuk "ekosistem KNMP" untuk pengembangan kawasan terintegrasi dengan transportasi [tol laut, bandara, dan jalan raya utama]

Pengembangan Konsep KNMP Berbasis Klaster

Klaster KNMP merupakan model pembangunan kampung nelayan yang saling terhubung dan berdekatan secara geografis serta memiliki keterkaitan ekonomi yang terintegrasi antara KNMP Hub dan KNMP Penyangga

Justifikasi:

- Produksi dan karakteristik wilayah beragam → perlu intervensi yang berbeda
- Kesulitan penyediaan lahan jika hanya bertumpu pada intervensi yang hanya membutuhkan lahan saja
- Membentuk "ekosistem KNMP" untuk pengembangan kawasan terintegrasi
- Kebutuhan penganggaran yang lebih fleksibel dengan mengkonsolidasikan alokasi anggaran dari beberapa desa ke dalam sistem klaster



DIFERENSIASI FASILITAS HUB & PENYANGGA BERDASARKAN KARAKTERISTIK LOKASI

(Keterangan : Akan Disesuaikan lebih lanjut dengan kebutuhan dan kesesuaian lokal setelah survei)

KNMP HUB

Pusat Konsolidasi & Pengolahan

 Cold Storage Eksklusif 

 Shelter Pendaratan 

 CoolBox 

 Kios Perbekalan 

 Pabrik Es 

 Sentra Kuliner 

 Mobil Pendingin 

 Kantor Pengelola 

 Kapal Ikan 

 SPBUN 

 Bengkel Nelayan 

 Balai Nelayan 

 Tambatan Perahu / Dermaga 

KNMP PENYANGGA

Titik Pengumpul Primer

✓ FASILITAS DASAR (WAJIB)

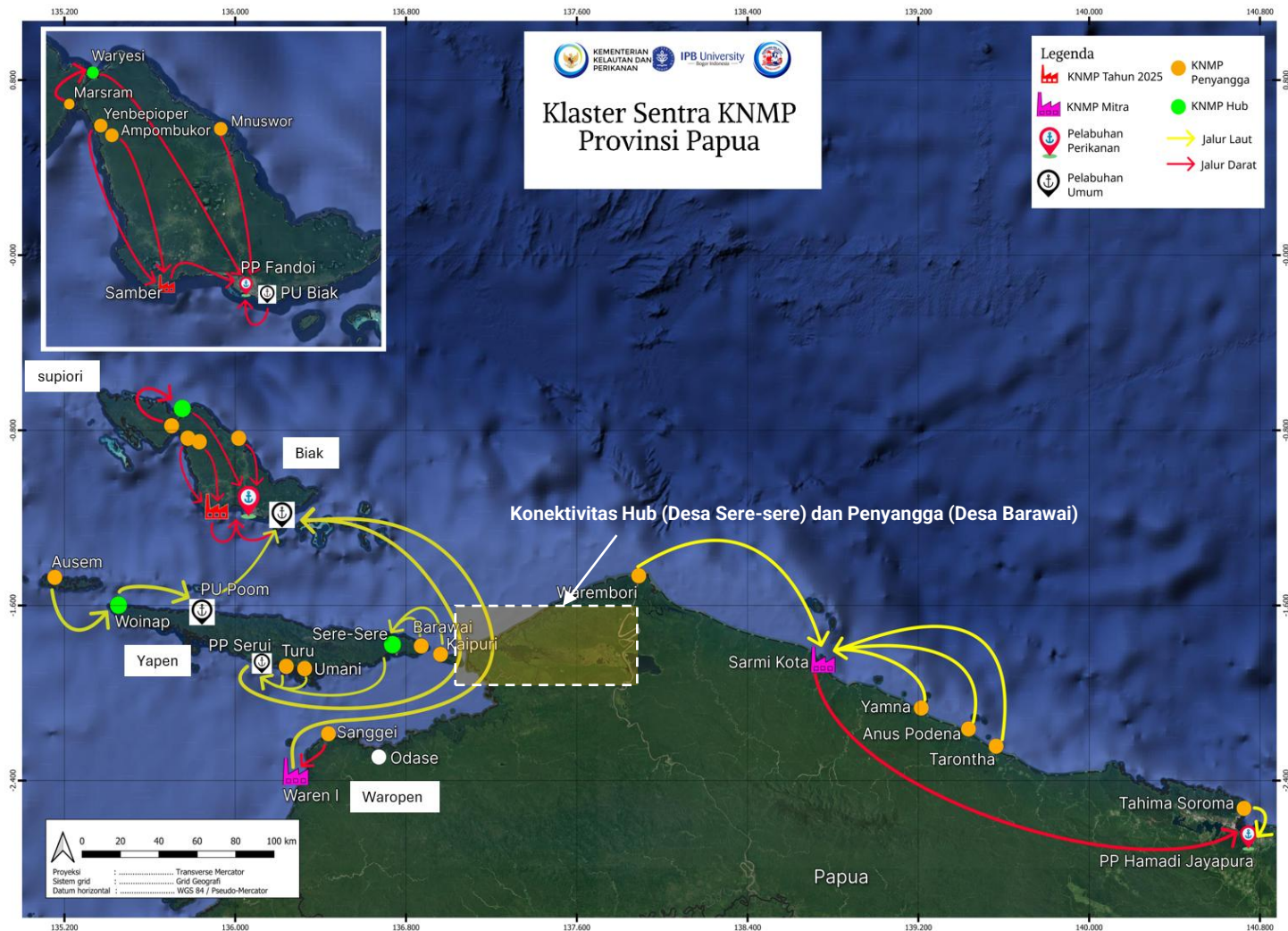
 Shelter Pendaratan  CoolBox

 Alat Tangkap  Tambatan Perahu

 Perahu & Mesin  Pabrik Es

KNMP KLASSTER PROVINSI PAPUA

(Contoh Pada Koridor logisti Perikanan: Biak & Jayapura)



Konektivitas



KNMP Hub (Titik Hijau)

Pusat konsolidasi dan pengolahan. Dilengkapi Cold Storage dan fasilitas lengkap sebelum kirim ke sentral.



KNMP Penyangga (Titik Orange)

Lokasi pengumpulan ikan primer dari nelayan. Fokus pada shelter pendaratan dan rantai dingin awal.



Sentral / Pintu Logistik

PP Fandoi-PP Hamadi & Pelabuhan Umum Biak. Pintu keluar distribusi regional dan nasional.

DIAGRAM ALIR RANTAI PASOK



DIAGRAM ALIR RANTAI PASOK

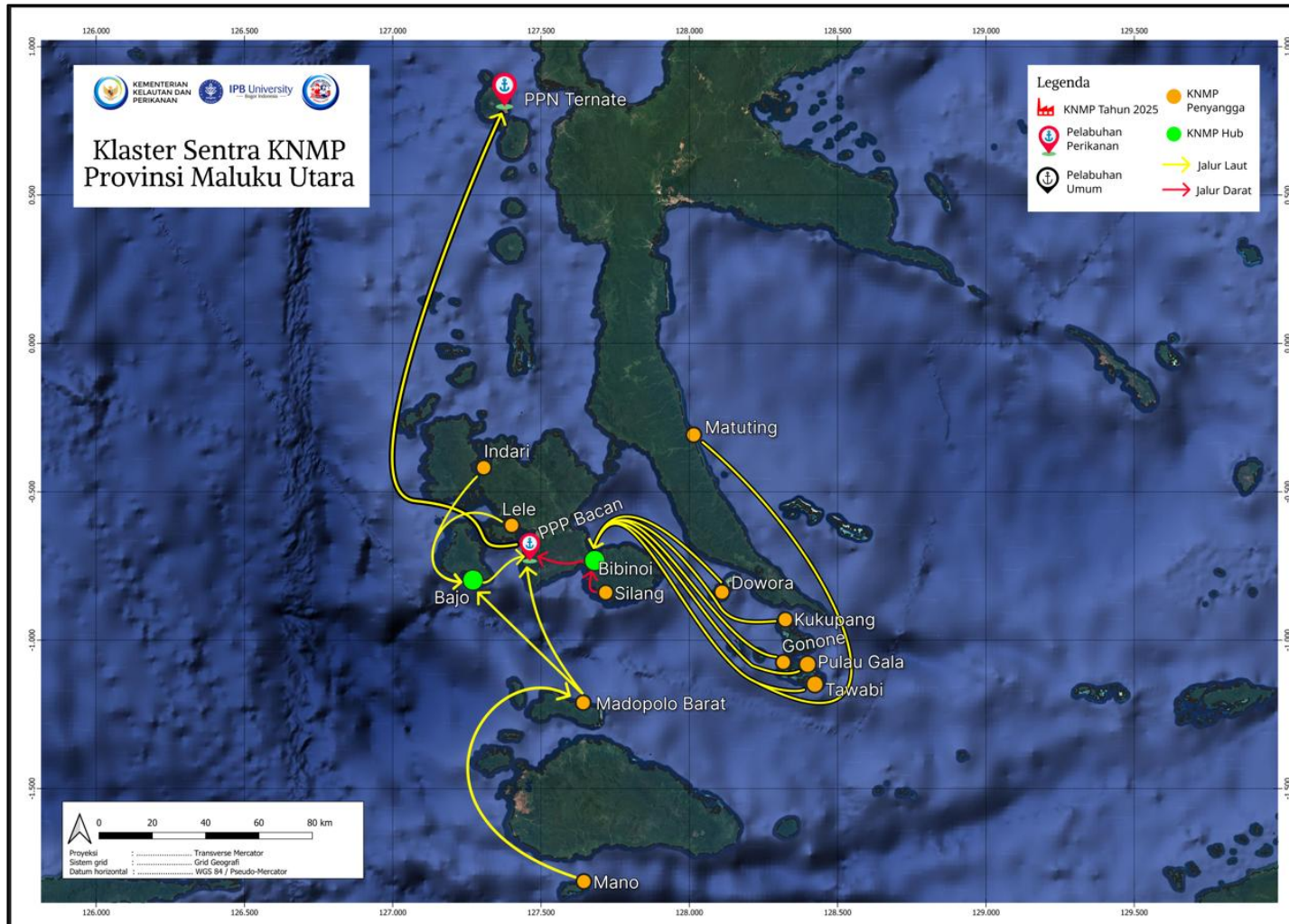


DUA KORIDOR UTAMA

1. Koridor Biak
2. Koridor Jayapura

KNMP KLASSTER MALUKU UTARA

(Contoh Pada Koridor logistic Perikanan: Bacan & Ternate)



Konsep Hierarki Logistik



KNMP Hub (Titik Hijau)

Pusat konsolidasi dan pengolahan. Dilengkapi Cold Storage dan fasilitas lengkap sebelum kirim ke sentral.



KNMP Penyangga (Titik Orange)

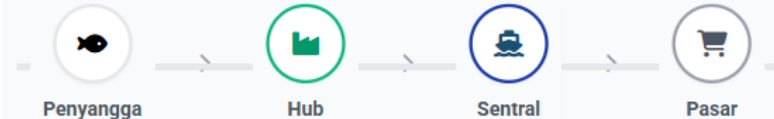
Lokasi pengumpulan ikan primer dari nelayan. Fokus pada shelter pendaratan dan rantai dingin awal.



Sentral / Pintu Logistik

PPN Ternate & Pelabuhan Umum. Pintu keluar distribusi regional dan nasional ke pasar.

DIAGRAM ALIR RANTAI PASOK

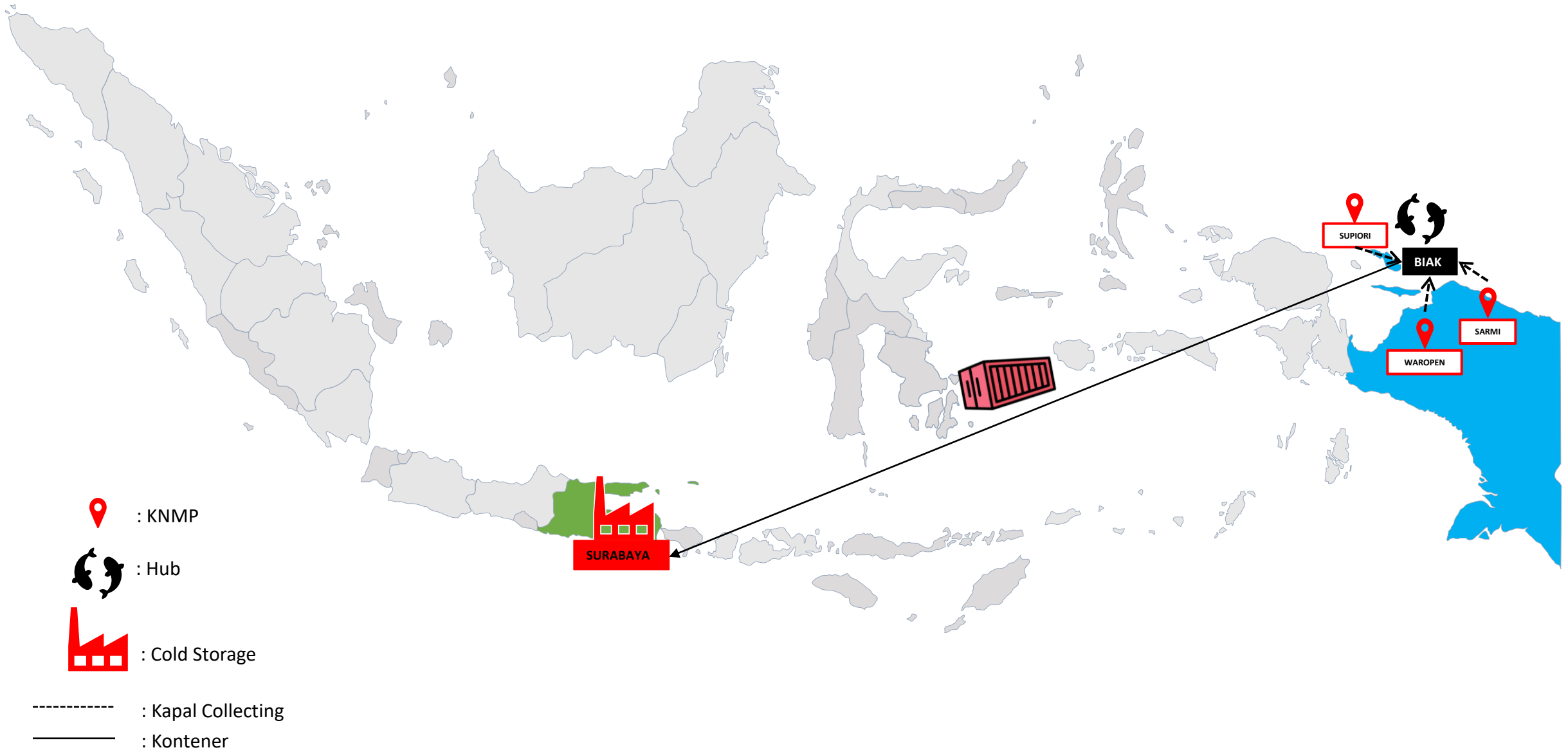


DUA KORIDOR UTAMA

1. Koridor Ternate (Utara)
2. Koridor Bacan (Tengah-Selatan)



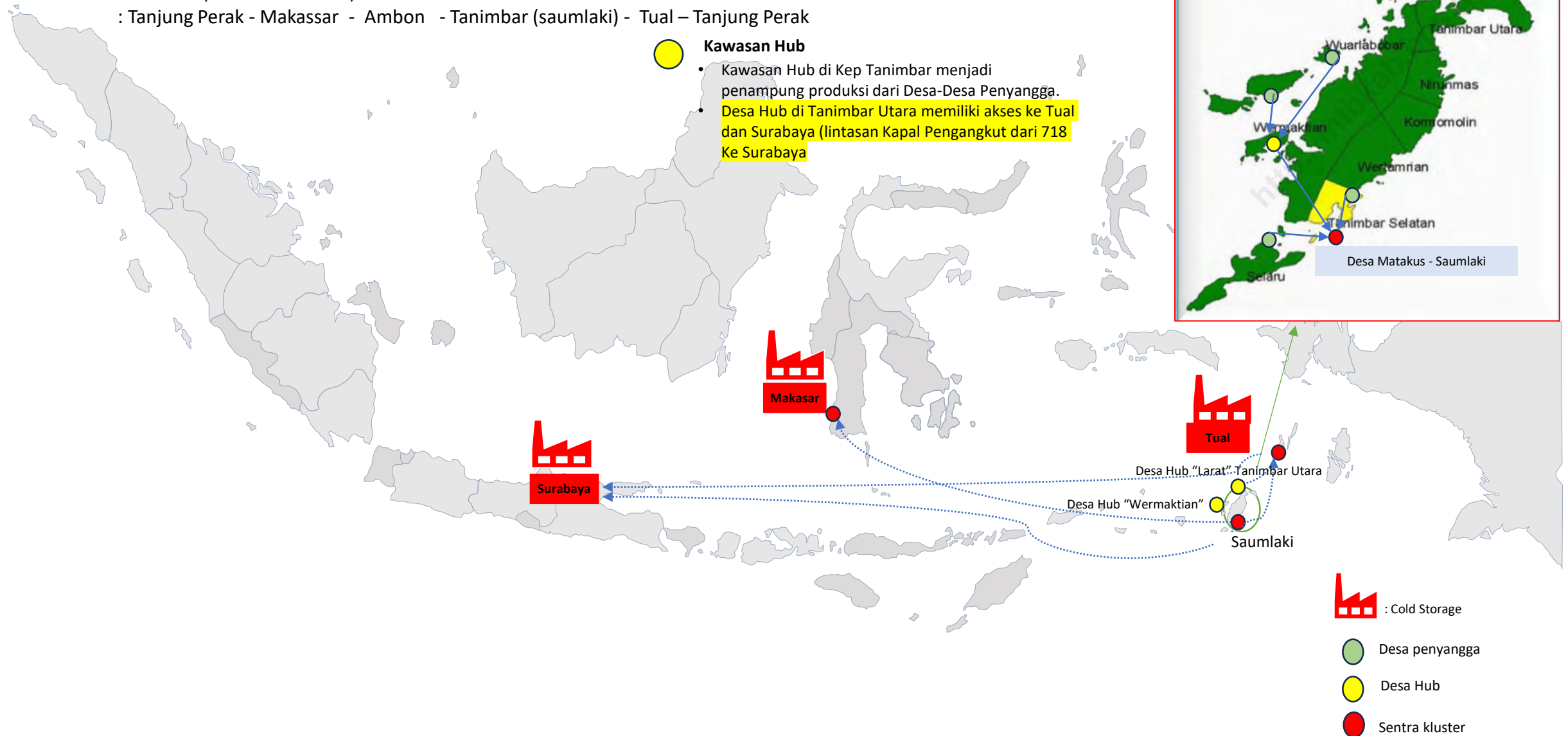
Strategi Supply Chain Klaster Papua Utara



Contoh Supply Chain Klaster KNMP Kep Tanimbar

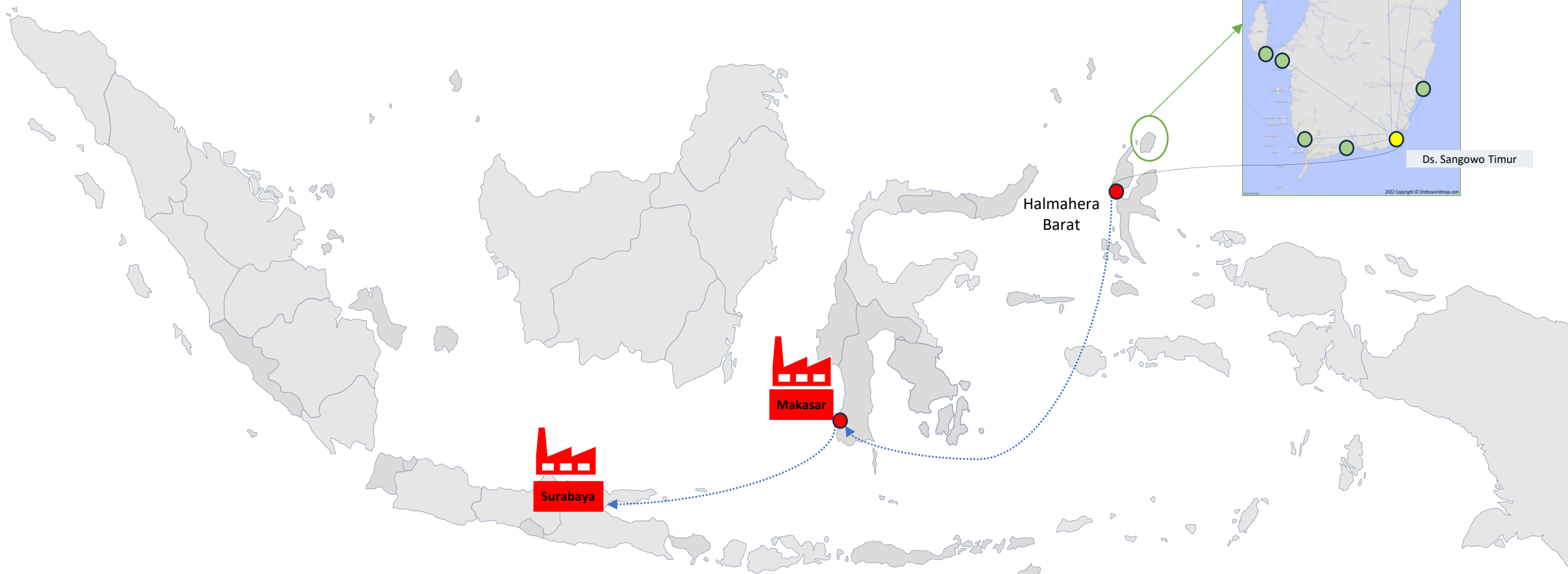
TOL LAUT (Sabuk Nusantara)

: Tanjung Perak - Makassar - Ambon - Tanimbar (saumlaki) - Tual – Tanjung Perak



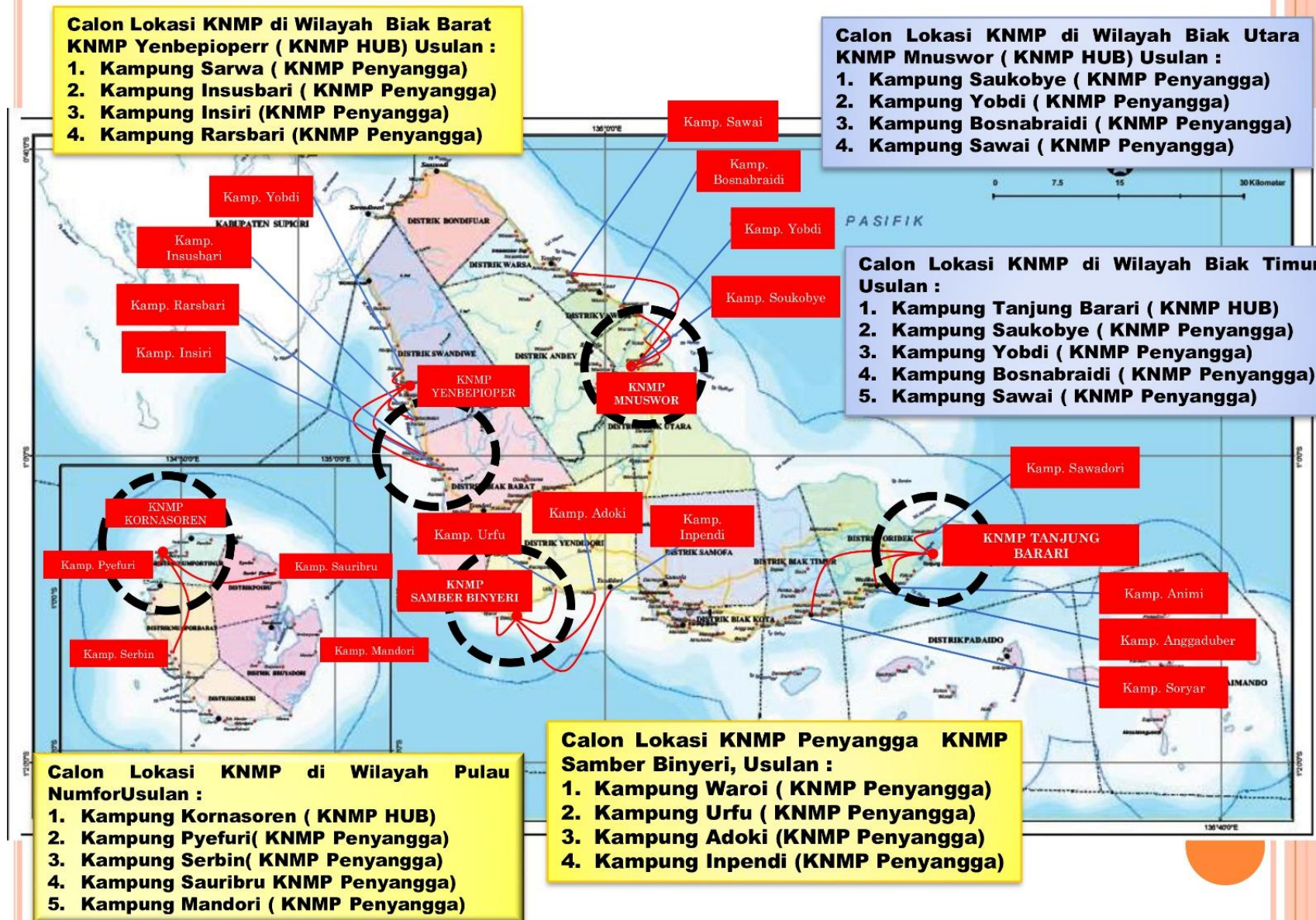
Contoh Supply Chain Klaster KNMP (Studi Kasus Morotai)

TOL LAUT: Tanjung Perak - Makassar (Soekarno Hatta) - Jailolo - Morotai (Daruba) - Tanjung Perak



: Cold Storage

-  Desa penyangga
-  Desa Hub
-  Sentra kluster



PERTIMBANGAN PEMILIHAN LOKASI

KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH (KNMP)

1 Aktivitas Nelayan

- Lokasi sandar nelayan
- Produksi Ikan Baik
- Desa Nelayan
- Akses Mudah

2 Status Lahan

- Bebas Sengketa
- Bukan Kawasan dilindungi
- Sesuai RTRW



- Luas 2 kategori :
> 5000 m2 atau < 5000 m2

3 Legal Jelas

- Tanah Desa/ Pemerintah Daerah
- Didukung Sertifikat/Dokumen Sah



4 Lahan Adat

- Musyawarah Adat
- Berita Acara & Surat Bupati



5 Dukungan

- Dukungan Tertulis dari :
 - Masyarakat
 - Tokoh Masyarakat
 - Pemda



Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)



1

Sosialisasi Program KNMP

- Mensosialisasikan rencana pelaksanaan pembangunan KNMP kepada masyarakat nelayan di desa calon lokasi
- Integrasi kelembagaan dengan KDMP



2

Penyediaan Lahan yang Clear & Clean

- Sertifikat lahan atau surat inventaris Kas Desa sesuai format Kemendagri
- Peta lahan, peta kontur, dan foto udara (drone)

3

Dukungan Infrastruktur Pendukung

- Pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju kawasan KNMP
- Infrastruktur dasar di luar kawasan KNMP

4

Dukungan Perizinan dan Legalitas

- Perizinan lahan dan bangunan :Dokumen UPL-UKL, KKPRL, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Dilakukan setelah lokasi resmi terpilih sebagai calon KNMP

5

Pendampingan dan Pemberdayaan

- Pendampingan Kelembagaan & Tata Kelola
- Pendampingan Usaha & Rantai Nilai Perikanan
- Fasilitasi Pembiayaan & Keberlanjutan

6

Dukungan Keamanan, Ketertiban & Sosial

- Penguatan dukungan sosial dan penerimaan masyarakat
- Pencegahan konflik lahan & sosial sejak awal

A vibrant, painterly illustration of a tropical coastal scene. In the foreground, a small wooden boat with a red hull is moored in the water. Behind it, a row of traditional stilt houses with thatched roofs sits on a sandy beach. The background is dominated by a dense, lush forest of palm trees and other tropical vegetation, rising up a hillside. The sky is filled with large, billowing white clouds, and a few birds are visible in flight. The overall color palette is warm, with a mix of blues, greens, and earthy tones.

Terima kasih



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



kkp.go.id



[@kkpgoid](https://www.instagram.com/kkpgoid)



[@kkpgoid](https://twitter.com/kkpgoid)



[kkp.go.id](https://www.tiktok.com/kkp.go.id)



[KKPPodcast](#)



141



Lampiran



Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan RI



kkp.go.id



@kkpgoid



@kkpgoid



kkp.go.id



KKPPodcast



141

Prosedur Pengusulan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)



Referensi dokumen usulan : <https://portal-repo.kkp.go.id/s/GqNiDFboSdbickE>.



Beberapa pertimbangan dalam memilih Lahan KNMP

No	Uraian	Keterangan
1	Lokasi lahan yang diusulkan berdekatan dengan Lokasi tempat pendataran kapal-kapal nelayan dan bukan lahan sempadan sungai/Pantai dan berada dalam satu hamparan (tidak terpisah)	Agar ikan hasil tangkapan nelayan dapat langsung tertangani dengan fasilitas di KNMP
2	- Lahan merupakan tanah Pemerintah Desa/Pemerintah Daerah dibuktikan dengan Copy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Tanah merupakan Aset Desa sesuai format Kemendagri - Dilengkapi dengan Surat pernyataan resmi Clean and Clear bermaterai ditandatangani Kepala Desa/Kepala dinas yang menangani aset daerah	Bukan lahan yang masih berstatus milik perorangan
3	Lokasi merupakan bukan area konservasi darat/laut, bukan area kehutanan (perhutani) dan tidak terdapat dalam bangunan/Gedung eksisting yang berpotensi bermasalah	Dikoordinasikan dengan Dinas LH, Bappeda, Dinas Kehutanan Provinsi&Kabupaten/Kota
4	Disarankan Lahan yang sudah matang, karakter tanah keras, datar (elevasi masih wajar)	Hindari tanah berawa, bergambut, berlumpur, elevasi ekstrim
5	Lahan terakses dengan jaringan Listrik 3 Phase untuk daya dukung Gudang Beku dan Pabrik Es	Meminta Surat keterangan ke PLN bahwa terdapat jaringan Listrik 3 Phase
6	Lokasi lahan terakses dengan jalan raya publik, sudah ada jalan menuju Lokasi yang diusulkan dapat di lalui truk	Dapat dilalui truk material, truk refrigerasi pengangkut ikan

CATATAN:

1. **Program KNMP bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik**, namun berorientasi pada pengembangan usaha, wilayah, produktivitas serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Lahan yang diusulkan harus clean and clear, tidak bermasalah (bukan di lokasi mangrove, hutan lindung, sempadan, sedimentasi, lahan bekas galian, dll), lahan yang diusulkan harus sesuai dengan peruntukannya (untuk aktivitas perikanan), dan kondisi lahan memenuhi syarat (misalkan tidak banjir, akses jalan tersedia dll)
3. Jika merupakan tanah hibah dari Masyarakat ke desa, maka butuh dokumen legal pendukung (surat pernyataan hibah, akta perubahan) dan pencatatan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) BPKAD (untuk memperkuat bahwa sudah menjadi aset desa. Jika tanah milik adat maka butuh dukungan surat/dokumen pelepasan adat, perubahan sertifikat... Jika inventaris desa maka harus ada bukti dari BPKAD bahwa merupakan aset desa. (Hal tersebut sebagai bentuk pencegahan konflik dimasa akan datang terkait status pemanfaatan lahan untuk KNMP)
4. Infrastruktur pendukung (air, listrik, jalan, transportasi)
5. Tidak ada potensi konflik yang timbul jika program KNMP dibangun di lokasi tersebut.

KRITERIA PEMBANGUNAN KNMP DI ATAS LAUT

1 PRINSIP DASAR



- KNMP di atas laut = fasilitas ekonomi berbasis komunitas - > pusat aktivitas nelayan
- Akses lperahu mudah, efisien waktu & tenaga
- Kesesuaian tata ruang laut
- Keselamatan aktivitas nelayan
- Keberlanjutan lingkungan pesisir

2 KEWAJIBAN PKKPR



Setiap pembangunan di atas laut wajib sesuai RZWP3K/RTRW setempat
Memiliki PKKPR



Melengkapi dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL)

Perlu Perhatian :

- Dilakukan evaluasi kesesuaian
- Kesesuaian dengan regulasi
- Benda bangunan tercatat dalam PKKPR

3 KRITERIA LOKASI



• Perairan tenang / semi-terlindung (teluk, muara, selat kecil)



• Tidak berhadapan langsung dengan laut lepas



• Gelombang rendah & arus terkendali



• Kedalaman dangkal dan stabil



• Bukan kawasan konservasi



• Tidak mengganggu alur pelayaran



• Dekat daratan untuk akses & evakuasi

4 LARANGAN PEMBANGUNAN



• Perairan dengan ombak besar atau gelombang musiman ekstrem tanpa pelindung alami



• Di atas terumbu karang hidup atau padang lamun



• Pada jalur pelayaran aktif



• Menebang mangrove untuk lokasi tanpa PKKPR



• Difungsikan sebagai pembuangan limbah ke laut

Desain Tata Letak (*Lay out*) Fasilitas KNMP Hub dan Penyangga

Area KNMP Hub



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

FASILITAS:

1. Tambatan Perahu (Lebar 4 m)
2. Shelter Pendaratan Ikan (5x12 m)
3. Tower (4 x 4 m), Reservoir Air (3x3x2 m)
4. IPAL
5. Gudang Beku Portable (8,5 x 14 m)
6. Bengkel Nelayan (3 x 4 m)
7. Revetment (Landing Stair)
8. Pabrik Es Portable (6 x 12 m)
9. Shelter Cold Box (5 x 8 m)
10. Kios Perbekalan Nelayan (4 x 6 m)
11. SPBUN
12. Toilet Umum (4 x 7,5 m)
13. Ikon KNMP
14. Sentra Kuliner (10 x 20 m)
15. Area Parkir
16. Kantor Pengelola (6 x 10 m)
17. Balai Nelayan (6 x 12 m)
18. Jalan Kawasan (Lebar 6 m)
19. Shelter Perbaikan Alat Tangkap (5 x 8 m)
20. Rumah Genset (4,5 x 7 m)
21. TPS (3 x 6 m)
22. Area Drop Zone
23. Shelter Pemasaran Ikan Segar (5 x 12 m)
24. Ruang Terbuka Hijau

Luas lahan darat : ± 10.000 M2



Desain Tata Letak (*Lay out*) Fasilitas KNMP Hub dan Penyangga

Area KNMP Penyangga-01



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



FASILITAS

1. Tambatan Perahu => Deck On Pile (Lebar 3 Meter)
2. Shelter Pendaratan Ikan (5 x 12 M)
3. Kios Perbekalan (4 x 6 M)
4. Pabrik Es Portable (7 x 10 M)

SARANA PENUNJANG

1. Cool Box (100 L)
2. Kapal Ikan (3 GT)
3. Alat Tangkap
4. Motor Tempel Kapal (15-20 Hp)

Lahan Darat

Panjang : 30 M
Lebar : 25 M
Luas : ± 750 M²



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAR www.kkp.go.id SUREL djpt@kkp.go.id

Nomor : B.794/DJPT.6/PI.420/III/2026 26 Maret 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rapat Koordinasi Usulan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Tahun Anggaran 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka persiapan Pelaksanaan Program Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir dalam kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Jum'at, 27 Maret 2026
waktu : pukul 13.30 WIB s.d. selesai
tempat : *Luring* :
Ruang Rapat Nelayan Lt. 12 GMB II Lantai 12
Daring :
Zoom Meeting :
<https://us06web.zoom.us/j/83958884392?pwd=rJ4rNBhIbWNU6EyYJN5Ih0e4Tb769h.1>
Meeting ID : 83958884392
Password : DJPT
acara : Koordinasi Usulan Calon Lokasi KNMP Tahun Anggaran 2026

Mengingat pentingnya kegiatan, kami sangat mengharapkan kehadiran dan partisipasi aktif Bapak/Ibu/Saudara tepat waktu. Registrasi kehadiran peserta melalui tautan https://s.id/Koordinasi_calon_KNMP2026. Narahubung kegiatan dapat menghubungi kontak resmi kami Tim KNMP HP. 0851-2201-7593.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan selaku Sekretaris Satgas
Pembangunan Kampung Nelayan Merah
Putih Tahun 2026,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahrus

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
2. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap selaku Ketua Satgas Pembangunan KNMP Tahun 2026.

Lampiran

Nomor : B.794/DJPT.6/PI.420/III/2026

Tanggal : 26 Maret 2026

DAFTAR UNDANGAN

A. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
2. Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan Kampung Nelayan Merah Putih
3. Inspektur II, Inspektorat Jenderal
4. Inspektur IV, Inspektorat Jenderal
5. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal
7. Kepala Pusat Data dan Informasi, Sekretariat Jenderal
8. Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Sekretariat Jenderal
9. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap
10. Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan
12. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
13. Direktur Kepelabuhanan Perikanan
14. Direktur Usaha Penangkapan Ikan
15. Direktur Pemasaran, Ditjen PDSPKP
16. Direktur Sarana dan Prasarana, Ditjen PDSPKP
17. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, BPPSDM KP
18. Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BPPSDM KP
19. Para Anggota Tim Satuan Tugas Pembangunan KNMP Tahun 2026 sebagaimana Kepmen KP Nomor 8 Tahun 2026
20. Para Penyuluh Perikanan

B. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi D I Yogyakarta
16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur

22. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
23. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara
25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara
26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
27. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo
28. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
29. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara
30. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat
31. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku
32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara
33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
34. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
35. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya
36. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
37. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan

C. Dinas Perikanan Kabupaten/Kota

Provinsi Aceh

1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Besar
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Selatan
6. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Nagan Raya
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Singkil
8. Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Timur
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie
14. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya
15. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue
16. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh
17. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa
18. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe
19. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang
20. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tenggara
21. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah
22. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Gayo Lues
23. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subussalam

Provinsi Sumatera Utara

24. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Samosir
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan
26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir
27. Kepala Dinas Perikanan Kota Tanjung Balai
28. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun

29. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karo
30. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Utara
31. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara
32. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Deli Serdang
33. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu
34. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara
35. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat
36. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal
37. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias
38. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Barat
39. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan
40. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara
41. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Padang Lawas
42. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai
43. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapanuli Selatan
44. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah
45. Kepala Dinas Perikanan Kota Gunung Sitoli
46. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
47. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar
48. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Humbang Hasundutan
49. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi
50. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
51. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Padang Lawas Utara
52. Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Sidempuan
53. Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga

Provinsi Sumatera Barat

54. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat
55. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam
56. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman
57. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang
58. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan
59. Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Mentawai
60. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung
61. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya
62. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
63. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
64. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok
65. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan
66. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Datar
67. Kepala Dinas Perikanan Kota Pariaman
68. Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
69. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawahlunto
70. Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
71. Kepala Dinas Pertanian Kota Bukittinggi
72. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Padang Panjang

Provinsi Kepulauan Riau

73. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan
74. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun
75. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga
76. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna

77. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas
78. Kepala Dinas Perikanan Kota Batam
79. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

Provinsi Riau

80. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
81. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan
82. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir
83. Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai
84. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak
85. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir
86. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar
87. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru
88. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti
89. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Rokan Hulu
90. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu
91. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kuantan Singingi

Provinsi Jambi

92. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi
93. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi
94. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Batanghari
95. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo
96. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
97. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merangin
98. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun
99. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
100. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
101. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci
102. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh

Provinsi Bengkulu

103. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muko-Muko
104. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
105. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah
106. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu
107. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan
108. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaur
109. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong
110. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seluma
111. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Kepahiang
112. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lebong

Provinsi Bangka Belitung

113. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang
114. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka
115. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah
116. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan
117. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat
118. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung
119. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur

Provinsi Lampung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

120. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat
121. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
122. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah
123. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur
124. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran
125. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat
126. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus
127. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
128. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat
129. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung
130. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara
131. Kepala Dinas Perikanan Kota Pringsewu
132. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mesuji
133. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
134. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Way Kanan

Provinsi Sumatera Selatan

135. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir
136. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
137. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu
138. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
139. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
140. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
141. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kota Prabumulih
142. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas Utara
143. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas
144. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
145. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Ilir
146. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang
147. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Lubuklinggau
148. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuasin
149. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Muara Enim
150. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lahat
151. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagaralam

Provinsi Banten

152. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang
153. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang
154. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak
155. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Serang
156. Kepala Dinas Pertanian Kota Serang
157. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tangerang Selatan
158. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon
159. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang

Provinsi Jawa Barat

160. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon
161. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
162. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu
163. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi
164. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

165. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Subang
166. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi
167. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Cianjur
168. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut
169. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya
170. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
171. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis
172. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
173. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
174. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat
175. Kepala Dinas Pertanian Kota Bogor
176. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar
177. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya
178. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Kuningan
179. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang
180. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta
181. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor
182. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi
183. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
184. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi

Provinsi Jawa Tengah

185. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang
186. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali
187. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes
188. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap
189. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak
190. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara
191. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen
192. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
193. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten
194. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus
195. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang
196. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati
197. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan
198. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
199. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
200. Kepala Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo
201. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
202. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal
203. Kepala Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Temanggung
204. Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang
205. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
206. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo
207. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta
208. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara
209. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas
210. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora
211. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kota Magelang
212. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga

213. Kepala Dinas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang
214. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen
215. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
216. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wonogiri
217. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
218. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Karanganyar
219. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga

Provinsi DKI Jakarta

220. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Utara
221. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Provinsi D I Yogyakarta

222. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulonprogo
223. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul
224. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
225. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
226. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Yogyakarta

Provinsi Jawa Timur

227. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo
228. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan
229. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
230. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
231. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember
232. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso
233. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Ngawi
234. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo
235. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo
236. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung
237. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan
238. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
239. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo
240. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban
241. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan
242. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
243. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang
244. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan
245. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
246. Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan
247. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro
248. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang
249. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang
250. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek
251. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gresik
252. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto
253. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun
254. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto
255. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi
256. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

- 257. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang
- 258. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep
- 259. Kepala Dinas Peternakan, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo
- 260. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri
- 261. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nganjuk

Provinsi Bali

- 262. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
- 263. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabanan
- 264. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Jembrana
- 265. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
- 266. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karangasem
- 267. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung
- 268. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Gianyar
- 269. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung
- 270. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangli

Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 271. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima
- 272. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu
- 273. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat
- 274. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah
- 275. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur
- 276. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa
- 277. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat
- 278. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara
- 279. Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram
- 280. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 281. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor
- 282. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belu
- 283. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende
- 284. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur
- 285. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kupang
- 286. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai
- 287. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ngada
- 288. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sikka
- 289. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat
- 290. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur
- 291. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 292. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Timor Tengah Utara
- 293. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata
- 294. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao
- 295. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Barat
- 296. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur
- 297. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagakeo
- 298. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Barat Daya
- 299. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Tengah
- 300. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua
- 301. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka

302. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Kupang

Provinsi Kalimantan Timur

- 303. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau
- 304. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
- 305. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Bontang
- 306. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 307. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Barat
- 308. Kepala Dinas Perikanan Kota Samarinda
- 309. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan
- 310. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- 311. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser
- 312. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mahakam Ulu

Provinsi Kalimantan Utara

- 313. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan
- 314. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan
- 315. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan
- 316. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanatidung
- 317. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malinau

Provinsi Kalimantan Tengah

- 318. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
- 319. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur
- 320. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas
- 321. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara
- 322. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
- 323. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pulang Pisau
- 324. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Katingan
- 325. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau
- 326. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan
- 327. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Timur
- 328. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara
- 329. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
- 330. Kepala Dinas Perikanan Kota Palangkaraya
- 331. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gunung Mas

Provinsi Kalimantan Barat

- 332. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak
- 333. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya
- 334. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah
- 335. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang
- 336. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang
- 337. Kepala Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas
- 338. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang
- 339. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kayong Utara
- 340. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau
- 341. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau
- 342. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang
- 343. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi

- 344. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
- 345. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Landak

Provinsi Kalimantan Selatan

- 346. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Banjarbaru
- 347. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banjar
- 348. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin
- 349. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tapin
- 350. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 351. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 352. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Balangan
- 353. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 354. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Laut
- 355. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu
- 356. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru
- 357. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong
- 358. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Kuala

Provinsi Sulawesi Tengah

- 359. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala
- 360. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palu
- 361. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan
- 362. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai
- 363. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali
- 364. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Poso
- 365. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sigi
- 366. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigi Moutong
- 367. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tojo Una-una
- 368. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli
- 369. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buol
- 370. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut
- 371. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Morowali Utara

Provinsi Sulawesi Barat

- 372. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene
- 373. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju
- 374. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar
- 375. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah
- 376. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasangkayu

Provinsi Sulawesi Tenggara

- 377. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bombana
- 378. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton

379. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan
380. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Utara
381. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka
382. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe
383. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Muna
384. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Muna Barat
385. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wakatobi
386. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka Utara
387. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan
388. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara
389. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Kepulauan
390. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-bau
391. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari
392. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah
393. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Kolaka Timur

Provinsi Sulawesi Utara

394. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa
395. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung
396. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara
397. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sangihe
398. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
399. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Talaud
400. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan
401. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Utara
402. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Manado
403. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
404. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
405. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
406. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow

Provinsi Gorontalo

407. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo
408. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo
409. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo
410. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato
411. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango
412. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gorontalo Utara

Provinsi Sulawesi Selatan

413. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pinrang
414. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba
415. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng
416. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto
417. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar
418. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Gowa
419. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai
420. Kepala Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros
421. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
422. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru
423. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone

- 424. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Utara
- 425. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu
- 426. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Luwu Timur
- 427. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar
- 428. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare
- 429. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo
- 430. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
- 431. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
- 432. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng
- 433. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Wajo
- 434. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Enrekang
- 435. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Kabupaten Tana Toraja
- 436. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toraja Utara

Provinsi Maluku

- 437. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon
- 438. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 439. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat
- 440. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur
- 441. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual
- 442. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Barat Daya
- 443. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara
- 444. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru Selatan
- 445. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tengah
- 446. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru
- 447. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru

Provinsi Maluku Utara

- 448. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sula
- 449. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat
- 450. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah
- 451. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Selatan
- 452. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Timur
- 453. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate
- 454. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore Kepulauan
- 455. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara
- 456. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai
- 457. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Taliabu

Provinsi Papua

- 458. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
- 459. Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura
- 460. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jayapura
- 461. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi
- 462. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Waropen
- 463. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Supiori
- 464. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor
- 465. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen
- 466. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya

Papua Barat

- 467. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat

- 468. Kepala Dinas Perikanan Kota Manokwari
- 469. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Manokwari Selatan
- 470. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Bintuni
- 471. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Fak-Fak
- 472. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana
- 473. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Teluk Wondama

Provinsi Papua Barat Daya

- 474. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya
- 475. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Raja Ampat
- 476. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong
- 477. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Selatan
- 478. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau
- 479. Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong

Provinsi Papua Tengah

- 480. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah
- 481. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika
- 482. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire

Provinsi Papua Selatan

- 483. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan
- 484. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
- 485. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asmat
- 486. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mappi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan
 Nelayan selaku Sekretaris Satgas
 Pembangunan Kampung Nelayan Merah
 Putih Tahun 2026,



**Ditandatangani
 Secara Elektronik**

Mahrus

Lampiran

Nomor : B.794/DJPT.6/PI.420/III/2026

Tanggal : 26 Maret 2026

**AGENDA
TENTATIF**
**Rapat Koordinasi Usulan Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
Tahun 2026**

Jakarta, 27 Maret 2026

Waktu (WIB)	Acara	Penyaji / Narasumber	Moderator
Kamis, 27 Maret 2026			
13.30 – 13.40	Pengantar Pertemuan	Panitia	
13.40 – 15.00	Penjelasan terkait Rencana Pembangunan KNMP 2026	Ketua Satgas Kampung Nelayan Merah Putih	Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Ditjen Perikanan Tangkap
15.00 - 15.30	Kriteria dan Persyaratan Usulan Calon Lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Rencana Survei KNMP	Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi, BPPSDMKP	
15.30 – 16.00	Diskusi dan Tanya Jawab		
16.00 – 16.05	Penutupan	Panitia	

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan selaku Sekretaris Satgas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mahrus

Dokumentasi Kegiatan

